

(1)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

Sejumlah Kemudahan Diberikan pada Proses Divestasi Newmont Bidik Pemda

JAKARTA (Media): PT Newmont Nusa Tenggara lebih menyukai pemerintah daerah menjadi mitra strategisnya ketimbang perusahaan swasta nasional dalam proses divestasi 10% saham perusahaan pertambangan emas dan tembaga tersebut.

Sikap tersebut ditunjukkan Newmont dengan memberikan berbagai kemudahan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membeli 10% saham senilai US\$391 juta.

Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadiano di Jakarta, kemarin, mengatakan pihaknya mendukung upaya Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat mengambil alih saham Newmont, sesuai aturan dalam kontrak karya. Dukungan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman lunak kepada ketiga

pemerintah daerah itu, yang bisa digunakan untuk pendanaan pembelian 10% saham Newmont.

Pinjaman tersebut akan dilunasi dari dividen bersih yang terutang. "Kami telah memberikan proposal pembiayaan untuk pembelian saham perseroan karena kami tahu pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk melakukannya."

Sebagai pemanis, Newmont juga menjanjikan pemerintah daerah akan mendapatkan dana sebesar US\$333.333 per tahun untuk setiap 1% saham yang dimilikinya selama perseroan masih tetap beroperasi.

Martiono juga menegaskan, apabila pihak pemda membentuk kon-

sorsium dengan mengundang pihak swasta, mekanisme yang dilakukan adalah negosiasi *business to business*. "Bila pemda bekerja sama dengan swasta, perlakuan yang berbeda akan diberikan, yaitu murni bisnis," tegas Martiono.

Menolak

Ia menolak berkomentar ketika ditanya soal kemungkinan pemda melego saham Newmont kepada pihak swasta setelah berhasil mendapatkan saham tersebut lewat mekanisme pinjaman lunak yang disediakan Newmont. "Kemungkinan tersebut masih kami kaji dalam *term and condition* perjanjian yang akan kita ajukan ke ketiga pemda tersebut," kata Martiono.

Ketika ditanya alokasi saham bagi pemda tetap 3%, Martiono mengatakan hal itu tergantung permintaan pemda.

"Yang jelas tahun ini kami akan

mendivestasikan 10% saham. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari alokasi 3% yang harus divestasi tahun lalu ditambah dengan alokasi divestasi 7% untuk tahun ini," papar Martiono.

Secara keseluruhan, sesuai dengan kontrak karya, Newmont akan melepas 31% saham, yang akan dilepas secara periodik dengan besaran 3% pada 2006, 7% pada 2007, dan setiap tahun melepas 7% hingga 2010.

Jika pemda ternyata tidak berminat, tahapan divestasi yang akan dilakukan adalah menawarkannya kepada swasta nasional strategis.

"Tetapi nanti proposal tidak berlaku dan aturannya akan berbeda. Sebab kan polanya bukan *government to business*, tapi *business to business*, dan kami sebagai penjual berhak memilih kriteria mengenai pembelinya," tuturnya. (Dre/E-2)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2007

PERTAMBANGAN

Newmont Tawarkan Pinjaman Divestasi pada Pemda di NTB

JAKARTA, KOMPAS — PT Newmont Nusa Tenggara, anak perusahaan PT Newmont Pacific Nusantara, yang mengoperasikan pertambangan emas dan tembaga di Batu Hijau, Sumbawa Barat, menawarkan opsi divestasi saham yang sangat mudah kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat.

PT NNT menawarkan pinjaman jangka panjang bebas risiko untuk pembelian saham tersebut yang bisa dicicil melalui dividen. Namun, pemda disyaratkan tidak menggandeng mitra swasta.

Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto di Jakarta, Rabu (15/8), mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan penawaran divestasi saham itu kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Jika pemda menerima skema tersebut, PT NNT juga akan memberikan dana untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 333.333 dollar AS per tahun untuk setiap 1 persen saham yang dimiliki pemda.

Sesuai dengan aturan kontrak karya, sebesar 51 persen saham PT NNT yang dimiliki pihak asing secara bertahap ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah Indonesia. Proses divestasi itu sudah harus dimulai tahun 2006 dan selesai tahun 2010.

Saham yang akan dilepas sebesar 10 persen terdiri atas 3 persen saham yang seharusnya dilepas tahun 2006 dengan nilai 109 juta dollar AS dan 7 persen saham

yang harus dilepas tahun 2007 dengan nilai 282 juta dollar AS.

Karena pemerintah pusat telah menyatakan tidak beminat membeli saham PT NNT, opsi berikutnya ditawarkan kepada pemerintah daerah di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Namun, proses divestasi menjadi molor karena tiga pemda yang menyatakan berminat membeli saham PT NNT membentuk konsorsium dengan mitra swasta. "Masalahnya, pihak pemda itu sudah lebih dulu menggandeng pihak swasta. Kalau kondisinya seperti ini, apakah perusahaan swasta yang digandeng itu dapat dikategorikan sebagai pihak pemda?" ujar Martiono.

Untuk itu, PT NNT kemudian mengajukan skema pemberian pinjaman kepada pemda dengan syarat tidak boleh ada mitra swasta.

Kewenangan dicabut

Secara terpisah, Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengatakan, pemerintah akan mencabut kewenangan penetapan hak khusus ruas transmisi pengangkutan gas melalui pipa pada wilayah tertentu yang dipegang Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas.

Selanjutnya kewenangan lelang akan dilaksanakan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Saat ini pemerintah sedang membahas perubahan kewenangan itu dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Hilir Migas. Paradigmanya, BPH Migas seharusnya hanya sebagai wasit jika terjadi masalah di antara badan usaha," katanya. (DPP/CSA)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

Newmont Minta Pemda tak Gandeng Swasta

JAKARTA — Pemda yang berminat atas saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) diminta untuk tidak mengikutsertakan swasta untuk memperoleh saham NNT yang akan dijual ke pemda. Menurut NNT, bila mengikutsertakan swasta, maka harga divestasi yang berlaku akan lebih tinggi dan NNT bakal meminta sejumlah syarat.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers divestasi saham NNT, Rabu (15/8). Dirut Newmont Pacific Nusantara, Martiono Hadianto, menjelaskan, bila ada swasta yang digandeng pemda, maka hal ini sulit dianggap sebagai permintaan pemerintah atas divestasi NNT. Di samping NNT mengenakan sejumlah syarat bila investor swasta berminat.

Syarat itu seperti, posisi swasta dan NNT akan seimbang, harga divestasi yang berlaku adalah harga pasar yang akan ditetapkan antara pembeli dan penjual. "Tentunya harganya berbeda (lebih

mahal) dengan harga yang ditawarkan NNT ke pemerintah," tandas Martiono. Dan NNT bisa menentukan kriteria swasta nasional apa yang boleh membeli sahamnya.

NNT sudah menyodorkan dua kali tahap divestasi ke pemda setempat (provinsi NTB, pemkab Sumbawa Besar, dan pemkab Sumbawa).

Tahap pertama pada Maret 2006, NNT menawarkan tiga persen saham pemegang saham asingnya yang senilai 109 juta dolar AS ke pemerintah pusat. Namun pusat menolak membeli saham NNT dan NNT menawarkannya ke pemda setempat. Kemudian, Maret lalu, NNT kembali menawarkan tujuh persen sahamnya yang senilai 282 juta dolar AS ke pemkab setempat.

Sebagai tanggapan atas penawaran itu, Pemkab Sumbawa Besar dan Provinsi NTB sempat mendirikan konsorsium dengan menggaet swasta untuk membeli saham yang ditawarkan. Namun, karena

divestasi yang dilakukan hanya untuk pemerintah, maka keterlibatan swasta dinilai NNT tidak sesuai dengan kesepakatan.

Komposisi Kepemilikan Saham NNT

- 80 Persen oleh Nusa Tenggara Partnership sebesar 80 persen (terdiri atas Newmont Indonesia Ltd 56,25 persen dan Nusa Tenggara Mining Corporation 43,75 persen).

- 20 persen dimiliki Pukuafu Indah Indonesia.

"Kalau divestasi ke swasta itu setelah divestasi ke pemda tidak diambil seluruhnya atau ditolak, dan harga divestasinya pun berbeda karena akan dilakukan secara bisnis murni, bukan dengan pemerintah," kata Martiono.

Untuk itu, akhirnya, pemda setempat membentuk perseroan terbatas yang 100 per-

sen sahamnya dimiliki daerah. Dan NNT bersedia memberi utang jangka panjang ke perseroan dimaksud supaya bisa membeli sahamnya. Utang ini diklaim tidak membebani APBD setempat.

Utang itu bersifat jangka panjang, diklaim tanpa risiko, dan pelunasannya bisa dilakukan dengan deviden. Selain itu, utang juga tidak memiliki jadwal pelunasan karena pelunasannya bergantung ke kemampuan NNT membayar deviden.

"Jika tambang meraih keuntungan lebih dari target maka pemda dapat melunasi utangnya lebih cepat, kalau tidak, pemda masih dapat menikmati pendapatan tetap yang berasal dari dana yang sudah dijamin," tambahnya.

Dalam klausul kontrak karya dengan pemerintah NNT diharuskan melepas secara bertahap 51 persen saham pemegang saham asingnya sejak 2006 sampai akhir 2010. ■ evy

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	<u>AGST</u>	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	<u>16</u>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

Newmont Tawari Divestasi US\$ 391 Juta

JAKARTA- PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menawarkan divestasi saham sebanyak 10% senilai US\$ 391 juta atau sekitar Rp 3,6 triliun kepada tiga pemerintah daerah, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Kabupaten Sumbawa (KS). Belum diketahui berapa bagian masing-masing pemda tersebut memperoleh saham hasil divestasi. Dirut PT Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadiano di Jakarta, Rabu (15/8), mengatakan, jumlah saham yang ditawarkan PT NNT sebesar 10 % merupakan jumlah penawaran saham 3% pada 2006 dan 7% tahun ini. PT NNT juga menawarkan pinjaman jangka panjang tanpa risiko kepada ketiga pemda untuk menalangi pembelian saham. Sedangkan besarnya bunga pinjaman bergantung pada hasil negosiasi. (pya)

55

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

Newmont Tawarkan Divestasi 10% Saham

JAKARTA (SINDO)—PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengajukan penawaran divestasi 10% saham secara bersamaan senilai total USD391 juta (Rp3,6 triliun) kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS).

"Proses divestasi yang semula dipecah, masing-masing 3% ditawarkan tahun 2006 dan 7% pada 2007, diputuskan untuk dilakukan secara paralel dan penyelesaian pengalihan saham dilakukan secara bersamaan," kata Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara—induk usaha PT NNT—Martiono Hadiano di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, penawaran penjualan itu merupakan bagian dari rencana divestasi 51% saham asing di PT NNT seperti diamanatkan dalam kontrak karya (KK) PT NNT dengan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, penawaran 10% saham PT NNT secara bersamaan itu telah disampaikan kepada ketiga pemda pada akhir pekan lalu. "Saat ini tinggal menunggu jawaban dari tiap pemda. Diharapkan jika semuanya berjalan lancar, proses divestasi 10% saham PT NNT akan tuntas akhir tahun ini," katanya.

Dalam proposal divestasi tersebut, ketiga pemerintah daerah, yakni Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa, dan Pemkab Sumbawa Barat, akan memperoleh alokasi saham dan masing-masing akan mendirikan sebuah perseroan terbatas (PT) yang bertujuan untuk memperoleh saham divestasi. "Perincian saham yang ditawarkan kepada ketiga pemerintah daerah serupa dengan alokasi royalti," kata Martiono.

Selain menawarkan pembelian saham, pemegang saham asing PT NNT akan memberikan opsi pinjaman jangka panjang dan tanpa risiko kepada ketiga pemda tersebut. Pinjaman yang diberikan berupa biaya keseluruhan yang diperlukan untuk membeli saham divestasi. "Pinjaman tersebut akan dikenai bunga dengan tingkat suku bunga yang akan dirundingkan lebih lanjut dan pelunasannya dilakukan dengan dividen," kata Martiono. Dia menegaskan, pinjaman itu tidak memiliki jadwal pelunasan yang ditentukan karena pelunasannya bergantung pada kemampuan PT NNT dalam membayar dividen. Sementara untuk memberikan manfaat lebih, pemegang saham asing PTNNT juga berkomitmen untuk menyalurkan dana kepada tiap pemda sebesar USD333,333 ribu per tahun (setelah dipotong pajak) untuk setiap 1%

56

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

Newmont Tawarkan Saham ke Pemda

Aris Eko
NERACA

Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengajukan penawaran divestasi (penjualan) 10 persen sahamnya secara bersamaan senilai total 391 juta dolar AS (sekitar Rp3,6 triliun) kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS).

"Proses divestasi yang semula dipecah masing-masing 3 persen ditawarkan tahun 2006 dan 7 persen pada 2007, diputuskan untuk dilakukan secara paralel dan penyelesaian

an pengalihan saham dilakukan secara bersamaan," kata Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara—in duk usaha PT NNT—, Martiono Hadiano kepada pers di Jakarta, Rabu.

Penawaran divestasi tersebut merupakan bagian dari rencana divestasi 51 persen saham asing di PT NNT sebagaimana diamanatkan dalam Kontrak Karya (KK) PT NNT dengan pemerintah Indonesia.

Martiono mengatakan, penawaran 10 persen saham PT NNT secara bersamaan itu telah disampaikan kepada ketiga pemda pada akhir pekan lalu. Hal itu dilakukan setelah Newmont Pacific mendapat

"lampu hijau" dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Saat ini tinggal menunggu jawaban dari masing-masing pemda. Diharapkan jika semuanya berjalan lancar maka proses divestasi 10 persen saham PT NNT akan tuntas akhir tahun ini," katanya.

Dalam proposal divestasi tersebut, ketiga pemerintah daerah, KSB, NTB dan KS akan memperoleh alokasi saham dan masing-masing akan mendirikan sebuah perseroan terbatas (PT) yang bertujuan tunggal untuk memperoleh saham divestasi. "Rincian saham yang ditawarkan kepada ketiga peme-

rintah daerah serupa dengan alokasi royalti," kata Martiono.

Selain menawarkan pembelian saham, pemegang saham asing PTNNT akan memberikan opsi pinjaman jangka panjang dan tanpa resiko kepada ketiga pemerintah daerah tersebut. Pinjaman yang diberikan berupa biaya keseluruhan yang diperlukan untuk membeli saham divestasi. "Pinjaman tersebut akan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang akan dirundingkan lebih lanjut dan pelunasannya dilakukan dengan dividen," kata Martiono.

Ia menegaskan, pinjaman itu tidak memiliki jadwal pelunasan yang ditentukan ka-

rena pelunasan pinjaman akan bergantung pada kemampuan PTNNT dalam membayar dividen.

Sementara untuk memberikan manfaat lebih, pemegang saham asing PTNNT juga berkomitmen untuk menyalurkan dana kepada masing-masing pemerintah daerah sebesar 333.333 dolar AS per tahun (setelah dipotong pajak) untuk setiap 1 persen saham yang dimiliki, selama tambang berproduksi. Menurut Martiono, tawaran pembiayaan pinjaman bertujuan agar ketiga pemda tidak terbebani untuk mencari dana segar baik dari lembaga keuangan maupun mitra swasta. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B.3

TAHUN 2007

Tujuh Persen Saham Newmont US\$ 282 Juta

Newmont menawarkan pinjaman kepada pemerintah daerah.

JAKARTA — PT Newmont Nusa Tenggara menetapkan nilai divestasi tujuh persen saham yang ditawarkan pada 2007 sebesar US\$ 282 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun. Penetapan angka tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadiano mengatakan proses divestasi tujuh persen saham itu akan dilakukan secara paralel dengan tiga persen saham yang ditawarkan pada 2006 senilai US\$ 109 juta (sekitar Rp 996 miliar). "Penyelesaian pengalihan sahamnya juga akan dilakukan bersamaan," ujarnya kemarin.

Bahkan, kata Martiono, Newmont Nusa Tenggara telah mengirimkan proposal penawaran resmi kepada kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa Besar untuk melakukan penawaran. "Kami melaku-

kukan itu setelah mendapat lampu hijau dari Departemen Energi," katanya.

Menurut dia, dalam pembagian saham, masing-masing pemerintah daerah dipastikan akan mendapatkan alokasi. Cara pembagian akan dilakukan seperti pembagian royalti.

"Tapi masing-masing pemerintah daerah harus mendirikan perusahaan terbatas untuk mendapatkan saham itu," tuturnya.

Pemegang saham asing Newmont Nusa Tenggara pun telah menawarkan pinjaman jangka panjang tanpa risiko kepada ketiga pemerintah daerah dengan tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Jumlahnya yang akan dipinjamkan sesuai dengan biaya keseluruhan untuk membeli saham divestasi dengan tingkat suku bunga yang dinegosiasikan.

Pelunasannya, kata Martiono, melalui pembayaran dividen dengan jangka waktu yang ditentukan bersama. "Maksimal sampai tidak ada operasi perusahaan," ujar dia.

Newmont Nusa Tenggara juga menjanjikan memberikan dana bagi tiga pemerintah daerah itu sebesar US\$ 333.333 per tahun,

dari setiap satu persen saham. "Dana itu untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat," tutur Martiono.

Martiono mengatakan, seandainya daerah menyatakan tidak berminat memiliki saham tersebut, divestasi akan ditawarkan kepada perusahaan swasta nasional strategis. Namun, aturan harga akan berbeda dengan pola *government to business*.

Harga yang akan digunakan jika ditawarkan kepada swasta, kata Martiono, akan menggunakan pola bisnis (*bussines to bussines*).

Sesuai dengan kontrak karya, Newmont Nusa Tenggara akan mendivestasikan 31 persen sahamnya hingga 2010. Perinciannya, divestasi pada 2006 ditetapkan tiga persen senilai US\$ 109 juta dan tujuh persen senilai US\$ 282 juta pada 2007 hingga 2010.

Asisten II Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Abdul Malik menyatakan telah menerima pemberitahuan dari Newmont terkait dengan pemberian pinjaman. Menurut dia, pihaknya masih melakukan pembahasan masalah tersebut.

● WAHYUDIN FAHMI | SUPRIYANTI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

Newmont plans to sell another 7% stake to local governments

Ika Krismantari
The Jakarta Post/Jakarta

As part of the mandatory divestment program imposed on foreign mining firms, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), the operator of a copper and gold mine in Batu Hijau, West Nusa Tenggara (NTB), is offering local governments another seven percent of the operation, in addition to the three percent currently under negotiation, a company executive says.

NNT's spokesman Martiono Hadiano said Wednesday that the offer was part of a "goodwill" package designed to help local communities, which would also include no-risk bridging loans to pay for the share purchases.

"Why we are doing this? It is because we want to forge a long-term investment commit-

ment, and for that we think we need the local administrations' participation as our strategic partners in realizing sustainable business operations," Martiono said.

He said that the local governments, comprising the provincial administration and the West Sumbawa and Sumbawa regency administrations, would also be allowed to pay the loans with the net dividends they receive from the company.

"Thus, the loans are virtually risk-free," said Martiono. "There is no payment due if there is no dividend flow. And if, for any reason, the mine stops operating before the loan is fully repaid, the balance of the loan will be forgiven," he explained.

He said that the local governments were assured of an annual cash flow of US\$333,333 for

each percentage of their ownership in the operation, in addition to the royalties.

"This guaranteed cash flow should help them improve services, such as education, healthcare and infrastructure," said Martiono who is also president director of PT Newmont Pacific Nusantara, the service company for the United States-based Newmont's operations in Indonesia.

Based on negotiations with the Energy and Mineral Resources Ministry, the seven percent and three percent stakes have been valued at US\$282 million and \$109 million, respectively.

The offer was made as part of the company's mandatory divestment program, under which the foreign shareholders of NNT must sell a minimum of 51 percent of the shares to local investors by 2010.

The company still needs to sell 31 percent of the operation by 2010 as a 20 percent stake is already owned by local firm PT Pukuafu Indah.

The local governments agreed to buy three percent of the operation last year in line with the divestment schedule, but failed to conclude the deal due to lack of money.

NNT, which began its Batu Hijau mine operation in 2000, produced 450 million pounds of copper and 447 million ounces of gold in 2006. This year, the company expects a 1.3 percent increase in its copper production to 455.9 million pounds, and an 8.2 percent increase in gold production to 484 million ounces.

NNT paid \$16 million in royalties to the government last year, while this year it is expected to pay about \$17.4 million.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DE RITE TEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

Pemerintah dan PT Lapindo Lalai

[JAKARTA] Pemerintah dan PT Lapindo Brantas lalai menanggulangi dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Seharusnya, potensi sekecil apapun yang bisa merugikan masyarakat perlu dicegah.

Hal tersebut diungkapkan saksi ahli Asep Warlan yang adalah pakar hukum administrasi negara Universitas Parahyangan Bandung dalam persidangan gugatan Walhi kepada PT Lapindo Brantas terkait semburan lumpur panas Porong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Selain PT Lapindo Brantas, sebagai tergugat dalam kasus ini antara lain, Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pekerja Migas, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo.

"Pemerintah seharusnya dengan cepat mengerahkan tenaga ahli melalui upaya teknis untuk mengurangi dampak risiko semburan lumpur panas. Itu yang tidak dilakukan. Jadi ada kelalaian untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar," paparnya.

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Wahyono, Asep mengatakan, secara administratif seharusnya pemerintah memaksa penanggung jawab (PT Lapindo) melakukan tindakan-tindakan, misalnya menutup semburan, merelokasi atau menghindari dampak yang lebih luas.

Terhadap perusahaan yang diduga menyebabkan terjadinya semburan lumpur, saksi ahli mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ling-

kungan Hidup. *Pertama*, perusahaan itu harus menghentikan pelanggaran. *Kedua*, harus memulihkan keadaan seperti semula. Langkah-langkah administratif yang dilakukan PT Lapindo guna mengurangi dampak dan memulihkan keadaan, menurut dia, masih belum maksimal.

Lalai

Setelah hampir satu tahun semburan lumpur panas belum mereda, ke depan secara administratif, lanjut Asep Warlan, pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena situasinya darurat. Penanggulangan Lapindo tidak cukup dengan Kepres dan Perpres. Itu hanya menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis, tidak pada keseluruhan dari persoalan. Keppres hanya berlaku di lingkungan eksekutif saja. Tapi Perppu lebih bersifat ne-

gara, sehingga bisa mengarahkan semua sumber yang dimiliki negara.

Penyebab Semburan

Saksi ahli lainnya, pakar pengeboran ITB, Dr Ing Rudi Rubiandini mengatakan, ada dua penyebab semburan lumpur panas Lapindo. *Pertama*, terjadinya luapan tekanan dari bawah tanah yang tidak terkontrol. *Kedua*, ketidaksiapan lubang akibat belum terpasangnya casing dari kedalaman 3.500 meter.

Dua penyebab itu mengakibatkan retakan yang kemudian membuat semburan. Di seluruh dunia apabila ada problem seperti ini, maka harus ada "komunikasi" dari permukaan tanah ke bawah. "Komunikasi" bisa dilakukan di sumur yang lama dengan snubbing unit,

ada penghalang.

Saat ditanya apakah penyebab semburan akibat pengeboran, Rudi mengatakan, dari hasil investigasi Juli 2006, kesimpulannya semburan terjadi akibat pengeboran sumur PJP I yang dilakukan Lapindo Brantas. Dia mengatakan, apabila semburan lumpur tidak dimatikan maka luas semburan akan terus berkembang.

Negara, kata dia sebenarnya mampu melakukan penghentian semburan lumpur panas. Anggaran operasional Migas nasional saja mencapai US\$ 7 miliar. Sementara untuk penanggulangan lumpur Lapindo hanya membutuhkan US\$ 50 juta saja. Jadi tidak mencapai 15 persen dari dana kegiatan operasional perminyakan di Indonesia. [M-17]

60

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE :** LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

Korban Lapindo Uji Perpres 14/2007 ke MA

Presiden dianggap berpihak pada kapitalis dan tidak demokratis.

JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dianggap melanggar undang-undang, karena hanya menguntungkan PT Lapindo Brantas Inc dan tidak memihak korban. Maka warga korban lumpur dari lima desa di Sidoarjo, yaitu Desa Besuki, Kedung Jangkring, Pejarakan, Jatirejo, dan Renokenongo akan mengajukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Taufik Basari, direktur Advokasi Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menjadi kuasa hukum korban lumpur Lapindo, uji materiil berupa permohonan atau gugatan akan diajukan ke MA paling lambat September mendatang.

Dijelaskannya, Perpres 14/2007 melanggar beberapa aturan, yakni UU Nomor 5/1960 tentang Pokok Agraria; asas perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata; serta kovenan hak-hak sipil dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam UU Pokok Agraria, subjek hukum kepemilikan atas tanah hanya bagi WNI perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan PT Lapindo tidak masuk kualifikasi itu.

"Kalau itu jual beli, nanti

tanah warga jadi milik siapa? Kalau jadi milik Lapindo itu melanggar UU Agraria," kata Taufik, di Jakarta, Rabu (15/8).

Lalu ganti rugi dalam bentuk pembelian tanah sesuai Perpres 14/2007 tidak memberi kebebasan pilihan ataupun kesetaraan kepada warga korban sesuai asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dalam KUH Perdata. Korban tidak punya pilihan selain menjual tanahnya kepada Lapindo tanpa bisa negosiasi harga. Ditambah ada ancaman penghentian jatah hidup dan aliran listrik ke lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong.

Perpres 14/2007 juga cenderung akan menghilangkan hak-hak warga atas ganti rugi seperti kompensasi hilangnya tanah, rumah, harta benda, tempat usaha, dan kete-

nangan hidup. Semua itu akan diganti dengan sekadar pembelian tanah saja.

Perpres sampah

Lilik Kaminah, warga Renokenongo, menolak penjualan tanah secara paksa ala perpres tersebut. Seharusnya Presiden menanyakan kepada rakyat apa yang diinginkan, bukan hanya bertanya kepada Lapindo.

"Presiden hanya bertanya pada (bos Lapindo) Nirwan Bakrie, kuat bayar uang muka berapa? Itu bukan demokrasi tapi kapitalisme yang bela kalangan atas. Ini perpres sampah!" umpat Lilik.

M Irsyad, warga Besuki, sangat keberatan dengan aturan pemetaan dalam Perpres 14/2007 karena warga empat desa yaitu Besuki, Kedung Jangkring, Pejarakan, dan Mindi tidak masuk sebagai

penerima ganti rugi dari Lapindo. "Sawah kami 59 hektare terendam lumpur. Dalam setahun bisa tiga kali panen. Tapi kerugian tidak panen ini tak dibayar," ujarnya.

Dia mengaku sejak September 2006 mengadakan ganti rugi panen namun selalu dipingpong Lapindo dan akhirnya mendapatkan jawaban menyakitkan: sesuai Perpres wilayah desanya di luar peta ganti rugi.

Sementara Amin, warga Jatirejo, menyatakan warga desanya tegas menolak menjual tanah. Mereka menuntut adanya tempat relokasi sementara yang layak, lengkap dengan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah. Itu lebih baik daripada diberi uang sewa rumah yang lokasi tinggalnya tidak jelas dan justru memecah-belah warga.

■ rto

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Korban Lapindo Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Pembacaan teks proklamasi akan digantikan dengan pembacaan "teks rakyat tertindas".

SIDOARJO — Korban lumpur Lapindo yang masih berada di tempat pengungsian berencana menggelar upacara bendera di Pasar Baru Porong untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. "Hanya, bendera tidak akan kami kibarkan sampai atas, tapi hanya setengah tiang," kata Ali Usman, koordinator pengungsi, kemarin.

Persiapan untuk upacara itu sudah dilakukan. Sebuah tiang bendera bambu setinggi 10 meter berdiri kukuh di sebelah utara lokasi pengungsian itu. Begitu juga dengan podium tempat pidato inspektur upacara, yang terbuat dari papan setinggi lima meter dan dikelilingi ratusan bambu runcing sebagai simbol perlawanan.

Menurut Ali, upacara ini digelar sebagai bentuk protes karena belum terpenuhinya tuntutan warga.

Para pengungsi ingin pembayaran ganti rugi menggunakan sistem 50 persen di muka dan sisanya dibayarkan dua kali, yaitu 20 persen dan 30 persen. Namun, berdasarkan peraturan presiden, ganti rugi mengikuti sistem 20 persen di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat dua tahun.

Dalam upacara 17 Agustus besok, warga akan membacakan "teks rakyat tertindas" untuk mengganti teks proklamasi. Kalimat-kalimat yang tercantum dalam "teks rakyat tertindas" ini sudah tentu bernada protes. Kalimat yang tercantum misalnya "rakyat tertindas di pengungsian", "rakyat tertindas di undang-undang", dan "kita harus bangkit dan ciptakan budaya perlawanan terhadap penindas". "Ini memang upacara perlawanan," kata Ali Usman.

Pada saat yang sama, besok Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) juga akan menggelar upacara peringatan 17 Agustus. Peringatan yang direncanakan BPLS ini digelar di atas tanggul lumpur yang berada di Desa Besu-

ki. Prosesi acaranya sama dengan upacara bendera pada umumnya.

Untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan ini, BPLS sudah memasang ratusan bendera dan umbul-umbul merah-putih di sepanjang tanggul. Bahkan di sekitar pusat semburan, umbul-umbul merah-putih dijejerkan melingkar. "Kami memang sengaja menghadirkan suasana 17 Agustusan," kata juru bicara BPLS, Moh. Zulkarnain.

Masih berkaitan dengan bencana lumpur Lapindo, pemerintah Jawa Timur sudah mulai memperbaiki dan melebarkan jalur alternatif Krian-Mojosari sebagai pengganti jalan raya Porong yang terimbas lumpur. "Total biaya perbaikan Rp 95 miliar. Tapi untuk tahap awal ini kami anggarkan Rp 45 miliar. Sisanya dianggarkan dari APBD 2008," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Soekarwo.

Saat ini jalan raya Krian-Mojosari menjadi satu-satunya jalur alternatif yang bisa digunakan jika jalan Raya Porong ditutup. Padahal jalur Porong merupakan jalur terpadat. ● ROHMAN TALFIQ

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
---	--

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 12

TAHUN 2007

Waras, Korban Lumpur Lapindo

Berhati Emas

Pak Waras (56) memang berhati waras. Di tengah makin mahalnya harga kebutuhan hidup, warga korban lumpur itu masih mau mendengar hati nurani ketimbang memanfaatkan uang yang memang bukan haknya. Wajar bila banyak pihak ikut meneteskan air mata ketika sosok sederhana ini menerima penghargaan dari PT Minarak Lapindo Jaya.

Pergulatan batin bapak 3 anak itu bermula ketika Waras mengecek rekening untuk menampung uang muka transaksi lahannya yang sudah tergenang lumpur. Waras yang memang sudah menunggu 20 persen ganti rugi uang pembayaran lahannya yang 2.440 meter persegi sebesar Rp 56 juta itu tak pernah menyangka saldonya akan kelebihan hingga Rp 429

juta.

Idealnya, dengan uang sebanyak itu Waras bisa berbuat banyak untuk keluarganya. Apalagi kebutuhan keluarga mereka sudah semakin melambung setelah menjadi korban langsung bencana lumpur. Dua dari 3 anaknya, Iswanto dan Sri Wahyuni, sudah berstatus pengangguran karena pabrik tempatnya bekerja ditutup karena lumpur.

Jumlah saldo itu bahkan jauh lebih besar dari total nilai ganti rugi yang akan mereka terima sebesar Rp 398 juta. Tapi itulah Waras. Kepala keluarga ini merasa serba tak enak gara-gara kelebihan uang ini. Bukan cuma tidak bisa tidur, Waras juga mengaku

tak enak makan. "Bukan cuma saya yang merasakan, tapi istri dan anak-anak saya juga merasakan hal yang tak pernah kami rasakan sebelumnya," kata dia.

Sebelum situasi menjadi makin berlarut-larut, keluarga amat sederhana ini kemudian mengeluarkan keputusan. Menurut Waras, keluarga yang dipimpinnya kembali mengingatkan tentang tujuan hidup mereka yang ingin tetap hidup adem-ayem tanpa masalah.

Kepolitan warga desa ini juga bergambar dari kekhawatiran bakal berurusan hukum bila tetap nekat menggunakan uang tersebut. Suami Astiyah itu tak bisa membayangkan kelanjutan nasib anak dan



WARAS – Waras, warga korban lumpur memilih mengedepankan suara hati nurani yakni mengembalikan sesuatu yang bukan haknya. Tampak Waras saat menerima tali asih dari Dirut PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla karena sikap kejujurannya..

(Istimewa)

istrinya bila dirinya masuk penjara karena kesalahan yang tidak dilakukannya itu.

Mereka kemudian sepakat mengalihkan kelebihan uang itu ke nomor rekening lain di BRI. Tujuannya sederhana, agar uang itu tak ikut terambil atau berpindah ke nomor rekening lain. "Tapi keputusan kami waktu itu sudah bulat untuk mengembalikannya ke Lapindo," ujarnya.

Hadiah

Ditemui di Surabaya kemarin, Waras juga mengaku tak mengira keputusan nya mengembalikan itu berbuntut hadiah. Atas kejujurannya itu, PT MLJ memberikan tali asih berupa uang tunai Rp 20 juta dan perhiasan emas senilai Rp 20 juta.

"Kami belum tahu akan didapatkan uang ini, wong pemberian ini sangat mendadak," ujarnya kepada Suara Karya, kemarin.

Yang jelas, sejak awal Waras hanya berencana membeli sawah baru di lokasi lain untuk menggantikan sawahnya yang sudah digenangi lumpur. Keputusan itu sudah bulat. Karena, selama ini kehidupan mereka memang amat bergantung pada hasil sawah.

Hingga melaporkan temuannya itu ke pihak MLJ melalui kepala desa, warga Desa Siring RT 08, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, itu mengaku tak pernah mengira akan mendapat anugerah itu. Bahkan dia sempat terheran-heran ketika diminta

menginap di Hotel Sanghri-la Surabaya, tempatnya menerima hadiah.

Sementara Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, tak menyalahkan siapa pun terkait kasus kelebihan bayar transaksi jual-beli lahan dan bangunan terdampak lumpur tersebut. Baginya yang terpenting adalah menyelesaikan semua berkas yang telah dinyatakan lolos oleh tim verifikasi.

Sebaliknya, dia mengaku prihatin bila ada informasi seolah-olah PT MLJ menghambat atau memperlambat proses transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur panas. "Sedih kami kalau dibeirikan seperti itu. Karena komitmen kami tetap seperti dulu: jika tim verifikasi menyatakan lolos, ya langsung kita bayar," katanya tegas, kemarin. (Andira)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

LAKSAMANA TIGA KALI DIPERIKSA KASUS TANKER **Jaksa Bingung Cari Tersangka**

Jakarta, RM. Bekas Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi untuk ketiga kalinya menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan dua unit kapal super tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik Pertamina.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Laks mengatakan bahwa penjualan dua tanker sudah dilakukan sepengetahuan Departemen Keuangan.

"Semua sudah kita bicarakan di kementerian, kan kita ada bagian hukumnya, ada PP No 41 yang melimpahkan semua kewenangan Menkeu ke Menneg BUMN selaku RUPS, karena Pertamina itu perseroan," tandas Laks yang didampingi kuasa hukumnya Petrus Salestinus.

Sejumlah pihak juga telah menjalani pemeriksaan dalam kasus ini termasuk di antaranya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.89 tahun 1991 pasal 12 ayat 1 dan 2 karena persetujuan Menteri Keuangan baru terbit tanggal 7 Juli 2004. Akibatnya, kasus ini diduga merugikan keuangan negara antara 20 juta dolar AS hingga 56 juta dolar AS.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman mengatakan, pihaknya belum akan menetapkan tersangka kasus ini.

selaku Komisaris Pertamina dan Hilda Zainal selaku Manajer Senior Perbendaharaan Pertamina.

Kasus ini bermula ketika Direksi Pertamina bersama-sama Komisaris Utama Pertamina tanpa persetujuan Menteri Keuangan melakukan investasi dua tanker VLCC milik Pertamina yang masih dalam tahap pembangunan di Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea Selatan, senilai 148 juta dolar Amerika.

Karena, masih ada beberapa pihak yang harus dimintai keterangan. "Kita masih terus melakukan pengumpulan bukti dan meminta BPK melakukan audit investigasi."

Kuasa Hukum Laksamana Sukardi, Petrus Salestinus mendesak agar Kejaksaan lebih profesional dalam menyidik kasus ini. Pasalnya walau sudah masuk tahap penyidikan namun penyidik tidak bisa memastikan adanya kerugian negara.

Dilempari Telur
Sementara itu, puluhan mahasiswa

dan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Mahasiswa untuk Keadilan Rakyat Indonesia (SAMURAI) kembali mendatangi Kejaksaan. Dalam aksi kali ini mereka melempari patung dengan menggunakan telur busuk. Patung tersebut ditemeli foto Soedono Salim. Mereka juga meneriakkan nama Sjamsul Nursalim.

"Sangat tidak adil kalau pemerintah tidak dapat menyeret para penjahat BLBI yang selama ini merugikan negara," pekik koordinator SAMURAI, Muhammad Rasyid. ■ LUK

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

Laksamana Diperiksa Empat Kali

JAKARTA (SINDO) –
 Mantan Meneg
 BUMN Laksamana
 Sukardi kembali
 diperiksa penyidik
 kejaksaan, kemarin.

Laksamana telah diperiksa empat kali dalam kasus penjualan dua tanker milik PT Pertamina. Sebelumnya, dia telah diperiksa tiga kali dalam kasus yang sama oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina ini dicecar 30 pertanyaan. Dia diperiksa selama delapan jam, guna pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan dua unit tanker (*very large crude carrier*/VLCC) milik Pertamina yang diduga merugikan negara sebesar USD20–56 juta.

Kuasa hukum Laksamana Sukardi, Petrus Selestinus, mengakui jika kliennya telah diperiksa Kejagung sebanyak empat kali. "Dua kali diperiksa di penyelidikan dan dua kali di tingkat penyidikan," kata Petrus.

Pada Selasa (14/8) lalu, Kejaksaan juga telah memeriksa mantan Komisaris Pertamina Syafruddin Tumenggung sebagai saksi selama 10 jam, dalam kasus yang sama.

Meski demikian, hingga kini Laksamana belum ditetapkan sebagai tersangka. Laks, begitu dia akrab disapa, tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan mobil Kia Innova didampingi kuasa hukum dan belasan simpatisan yang tergabung dalam Barisan Merah Putih. Sekitar pukul 18.45 WIB, Laks keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Dia mengaku dicecar pertanyaan sehubungan dengan VLCC. Tapi dalam keterangan-

65



DIPERIKSA: Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi penjualan dua unit tanker milik PT Pertamina di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

nya pada wartawan kemarin, Laks menyakini penjualan tanker VLCC tersebut tidak memerlukan izin Menteri Keuangan (Menkeu). Dalam PP No 41/2003 disebutkan, Menkeu telah melimpahkan wewenang kepada Meneg BUMN sebagai rapat umum pemegang saham (RUPS). "Kan Pertamina sudah menjadi perseroan," ujarnya. Padahal, alasan pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan, karena penjualan tanker itu tidak melalui izin Menkeu.

Laks membantah sebagai Komisaris Utama Pertamina, saat itu dianggap sebagai penanggung jawab dalam proses penjualan tanker. Menurut dia, langkah tersebut merupakan

kegiatan korporasi dimana direksi maupun komisaris duduk bersama dalam mengambil putusan.

Uang yang dikeluarkan Pertamina, tegas dia, baru sebatas pembayaran uang muka, belum *fix asset*. "Kalau istilahnya beli mobil baru inden, jadi STKN-nya bukan atas nama perseroan, apalagi negara," katanya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman yang dimintai tanggapan belum bersedia menjelaskan isi materi pemeriksaan Laks. Dia hanya mengatakan bahwa proses penyidikan kasus VLCC terus berjalan, dan seluruh hasil pemeriksaan masih dalam tahap anali-

sis. "Ini masih terus dilanjutkan dan pemeriksaan masih berlanjut," katanya.

Sementara itu, anggota badan pekerja ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengungkapkan, hendaknya Kejaksaan terus memeriksa setiap orang yang diduga terlibat kasus tersebut, dan tidak hanya memfokuskan pada pemeriksaan Laksamana.

Sebab, jika pemeriksaan dilakukan hanya pada Laks, kasus VLCC susah terungkap. "Kalau hanya dia yang diperiksa maka kasus ini tidak terungkap. Untuk melihat keterlibatan Laks, maka harus diperiksa juga para Direksi Pertamina saat itu. Perlu diingat, saat itu Laks adalah regulator,"

katanya.

Kasus ini terjadi ketika pada 11 Juni 2004 jajaran direksi dan komisaris Pertamina melakukan divestasi (penjualan) dua kapal VLCC yang dipasok Hyundai Heavy Industries (HHI) Ulsan Korea kepada rekanan Frontline yang berkedudukan di Singapura. Penjualan tersebut dihargai sebesar USD184 juta tanpa persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu). Selain bertentangan dengan SK Menkeu No 89/1991 Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang baru keluar 7 Juli 2004, kerugian negara ini terjadi karena Pertamina menjual di bawah harga pasaran yang saat itu berkisar USD204-240 juta.

(whisnu bagus/kholil)

65

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



KORUPSI VLCC - Antara
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung berada di dalam mobil usai diperiksa Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (14/8). Syafruddin memenuhi panggilan Kejagung untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan tanker raksasa (VLCC) milik Pertamina.

Terkait VLCC, Laks Kembali Datangi Kejagung

Jakarta- Laksamana Sukardi kembali mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (15/8). Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini (BUMN) kembali memberikan keterangannya terkait kasus penjualan kapal tanker very large crude carrier (VLCC) yang ditangani Kejagung.

Namun, ia yakin Kejaksaan akan objektif mengusut kasus ini sebagaimana dilakukan Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang sama.

"Kalau dijadikan tersang-

ka, darimana pokoknya? Saya yakin kejaksaan akan objektif," papar anggota Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ini, sesaat memasuki Gedung Bundar, Rabu (15/8).

Terkait kasus yang sama, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebelumnya juga diperiksa penyidik. Ia mengaku hanya dicecar 15 pertanyaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi penjualan kapal tanker raksasa

Pertamina (VLCC).

"Pertanyaannya tidak banyak saya kira. Secara substansi tidak lebih dari 15 pertanyaan, ya terkait dengan VLCC," kata Syafruddin yang diperiksa selama 10 jam itu, Selasa (14/8).

Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Dewan Komisaris Pertamina yang mengetahui penjualan kapal tanker raksasa milik Pertamina. Sebelumnya, Syafruddin telah dua kali mangkir dari panggilan Kejagung (rafael.sehingga)

66

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

Kasus VLCC Kejagung Diminta Lebih Profesional



ANTARA/FOURI GESANG SHOLEH

Mantan anggota Dewan Komisaris Pertamina, Syafruddin Temenggung meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (14/8). Syafruddin diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan tanker milik Pertamina.

[JAKARTA] Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta lebih profesional dalam menyelidik dan menyidik kasus dugaan korupsi penjualan dua unit kapal tanker *very large crude carrier* (VLCC) oleh PT Pertamina yang merugikan negara US\$ 20 juta (sekitar Rp 180 miliar) sampai US\$ 50 juta (sekitar Rp 450 miliar).

"Buktinya kasus ini sudah masuk ke tingkat penyidikan, tapi Kejagung belum menemukan unsur kerugian negaranya. Kejagung masih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

melakukan audit investigasi," kata salah satu kuasa hukum Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, Petrus Selestinus SH kepada SP, Rabu (15/8).

Laksamana hari ini kembali diperiksa Kejagung terkait kasus tersebut. "Beberapa kali Laksamana diperiksa Kejagung, namun substansi pertanyaan yang disampaikan sama. Ini *kan* menunjukkan mereka memaksakan kasus ini masuk ke tahap penyidikan," kata Petrus.

Terkait kasus tersebut,

sebelumnya Kejagung memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung, Selasa (14/8). Mantan anggota Dewan Komisaris Pertamina itu tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, sekitar pukul 08.55 WIB, mengendarai mobil Toyota Kijang Innova B 1732 QW berwarna coklat. Syafruddin sebelumnya telah dua kali mangkir dari panggilan Kejagung.

Dalam beberapa kesempatan, Laksamana mengatakan, penjualan dua unit kapal tanker VLCC itu dilakukan sesuai prosedur, yaitu usulan datang dari direksi ke komisaris hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia mengatakan, dari penjualan dua unit kapal VLCC itu, Pertamina mendapat keuntungan US\$ 53 juta. "Jadi tidak benar kalau negara rugi," kata dia.

Lebih jauh Laksamana menjelaskan, dua unit kapal tanker itu dijual dengan tujuan menghindari penyitaan yang dilakukan oleh lembaga arbitrase internasional, akibat keputusan penghentian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Karaha Bodas. [E-8]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

KORUPSI VLCC

Laksamana Diperiksa Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Rabu (15/8), kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker raksasa atau *very large crude carrier* (VLCC) Pertamina.

Pemeriksaan Laksamana dalam proses penyidikan ini untuk yang kedua kalinya.

Rabu kemarin, Laksamana diperiksa sekitar sembilan jam. Laksamana didampingi penasihat hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Kepada wartawan, Laksamana beberapa kali menegaskan, dua VLCC Pertamina yang dijual itu bukanlah aset negara. "Karena uangnya tidak diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," katanya.

Menurut Laksamana, saat dijual, VLCC masih dalam proses pembuatan oleh Hyundai Heavy Industries di Korea. Selain itu, VLCC belum dibayar lunas, baru

uang mukanya saja. "Apakah ini aset negara?" tanya Laksamana.

Selama Laksamana diperiksa, belasan orang yang mengenakan kaus bertuliskan "Barisan Merah Putih" menunggu di halaman Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung Muhammad Salim menyampaikan, kejaksaan dan Departemen Luar Negeri sudah berkoordinasi untuk meminta keterangan lima pihak dari luar negeri terkait penjualan VLCC. "Surat panggilan sudah mereka terima. Kami akan tanyakan prosedur penjualan, bagaimana pembelian VLCC itu. Kami harap mereka datang minggu depan," kata Salim.

Sebagaimana disampaikan kejaksaan, penjualan VLCC itu diduga merugikan keuangan negara sebesar 20 juta-56 juta dollar AS karena dijual di bawah harga pasar yang saat itu 204 juta-240 juta dollar AS. (IDR)



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memenuhi panggilan penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung, Rabu (15/8). Laksamana diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penjualan kapal tanker raksasa Pertamina/VLCC.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

Penetapan Tersangka Kasus VLCC Pekan Depan

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan kapal tangker *very large crude carrier* (VLCC) oleh Pertamina, pekan depan. Kejagung masih menunggu hasil pemeriksaan wakil lima perusahaan asing yang terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan VLCC tersebut. "Namanya penyidikan pasti sudah ada tersangka tapi kita belum bisa menentukan siapa tersangka tersebut sekarang," ujar Jaksa Agung Muda

Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kemas Yahya Rahman, Rabu (15/8).

Direktur Penyidik pada JAM Pidsus, M Salim, menjelaskan, mulai awal pekan depan, pihaknya akan memeriksa saksi dari lima perusahaan asing yang terlibat dalam kasus ini. Lima perusahaan tersebut, rinci Salim, adalah konsultan keuangan, pembeli, hingga pembuat kapal tangker. Berdasarkan catatan, lima perusahaan tersebut adalah Frontline Ltd, Goldan-Sachs, Hyundai Heavy Industry, Lehman Brothers, dan

Equinox.

Rabu (15/8), mantan Komisaris Utama Pertamina, Laksamana Sukardi, memenuhi panggilan pemeriksaan kedua dari Kejagung sebagai saksi. Mengenakan kemeja bergaris hijau dibalut jaket hitam, Laksamana datang sekitar pukul 09.20 WIB di Gedung Bundar Kejagung. Laksamana terlihat didampingi pengacaranya Petrus Selestinus dan 10 orang dari Barisan Merah Putih.

Meski Laksamana telah dua kali diperiksa, Salim menambahkan,

Kejagung tidak akan menetapkan tersangka sebelum pemeriksaan semua saksi rampung. Karenanya, Kejagung mengharapkan, kelima wakil perusahaan asing pekan depan memenuhi panggilan pemeriksaan. "Saya bertemu Pak Harvaz (wakil dari Deplu-Red), surat undangannya sudah disampaikan," kata Salim.

Kejagung mulai menyelidiki kasus VLCC sejak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kerugian negara dari hasil penjualan dua VLCC di tahun 2005. ■ dri

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

KASUS VLCC

Kejagung Segera Tetapkan Tersangka

JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal tanker raksasa (*Very Large Crude Carrier/VLCC*) Pertamina yang merugikan negara Rp 241 miliar.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, se usai pemeriksaan mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris Pertamina. "Mungkin dalam

waktu singkat ini," kata Kemas.

Kasus ini berawal saat Pertamina menjual dua unit tanker dari Hyundai Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan, tahun 2002. Dengan alasan kesulitan likuiditas, Pertamina melepas dua tanker berukuran raksasa itu kepada Frontline Ltd tanpa seizin Menteri Keuangan. Akibatnya, negara dirugikan Rp 241 miliar.

Secara terpisah, Direktur Penyidikan pada Pidsus, M Salim, mengatakan, penetapan tersangka kasus VLCC baru bisa dilakukan setelah semua

saksi diperiksa dalam kasus itu. Selain itu, Kejagung masih menunggu audit BPK untuk mengetahui jumlah pasti kerugian negara.

Salim mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan 5 perusahaan asing terkait kasus penjualan VLCC. "Minggu depan kan jadwalnya konsultan-konsultan dari luar negeri itu mau kita periksa, jadi ya tunggulah," ucap Salim.

Berdasarkan informasi Deplu, kata Salim, surat panggilan itu sudah diterima kelima perusahaan itu. Saat ini Kejagung dan

Deplu kini tengah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Kelima perusahaan tersebut adalah Frontline Ltd sebagai pihak pembeli, Goldman Sachs, Hyundai Heavy Industry, Lehman Brothers dan Equinox.

Menurut Salim, ketarangan 5 perusahaan itu sangat diperlukan karena mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat penjualan dua kapal itu pada 2004 lalu. "Kita harus tahu prosedur yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan pembelian, penghitungan dan sebagainya," kata Salim.

Sementara itu, saat hendak diperiksa, Laksamana Sukardi yakin tidak akan menjadi tersangka kasus VLCC. Sebab, katanya, status VLCC itu sendiri belum menjadi aset tetap Pertamina.

"Kalau bangunan istilahnya, HGB-nya belum atas nama Pertamina. Kalau beli mobil itu masih *indent*, STNK-nya belum nama perseroan atau atas nama negara," kata dia.

Ia menjelaskan, saat kapal tanker itu dijual, harga minyak sedang membumbung tinggi. Menkeu saat itu, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, meminta dana sebesar Rp 18 triliun kepada Pertamina untuk membayar subsidi minyak. "Itu adalah pendapatan operasional dua tahun anggaran 2002-2003," ujarnya. (Jimmy Radjah)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN: 12

TAHUN 2007

Laksamana Dicecar 30 Pertanyaan

JAKARTA – Tim Penyidik Kejaksaan Agung, Rabu (15/8) kembali memeriksa mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dua unit kapal super tanker *very large crude carrier* (VLCC). Diperiksa sejak pukul 10.00 sampai 18.45 WIB, Laksamana dicecar 30 pertanyaan.

“Ada 30 pertanyaan, tapi yang substansial 20 pertanyaan,” ujar Laksamana. Menjawab pertanyaan tentang kerugian negara, Laksamana menegaskan, tidak ada kerugian negara dalam proses penjualan VLCC, seperti tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebaliknya, penjualan ini memperoleh keuntungan US\$ 53 juta dolar.

Pada Senin (30/7) lalu penyidik sudah mem-

eriksa Roes Aryawijaya, mantan Komisaris Pertamina bidang Deputi Usaha Pertambangan Telekomunikasi Industri Strategis. Sampai kini sudah 20 saksi dimintai keterangan.

Kasus VLCC ini berawal saat Pertamina menjual dua unit tanker dari Hyundai Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan, pada 2002. Dengan alasan kesulitan likuiditas, Pertamina melepas dua tanker berukuran raksasa itu kepada Front Line, tanpa seizin menteri keuangan.

Data penyidik Kejagung yang diterima dari KPPU menyebutkan, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 204 juta. Kerugian terjadi karena VLCC dijual di bawah harga pasar. (c109)

7d

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 8

Oleh ENDOT BRILLIANTONO
Bisnis Indonesia

Sehari sebelumnya, Kejagung juga memeriksa mantan anggota Dewan Komisaris Pertamina, Syafruddin Arsyad Temenggung, yang juga mantan Ketua BPPN.

TAHUN 2007

Laksamana kembali diperiksa Kejagung

JAKARTA: Mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi kemarin kembali diperiksa tim penyidik Kejaksanaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dua tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*) milik PT Pertamina.

Mantan Komisaris Utama Pertamina itu datang ke Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 10.10 wib didampingi kuasa hukumnya dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

"Dari 30 pertanyaan yang diajukan, hanya 20 yang substansial," kata Laksamana se usai menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam tersebut.

Seperti yang diucapkan sebelumnya, dia merasa optimistis tidak akan menjadi tersangka dalam kasus ini, karena status VLCC pada saat itu belum jadi aset Pertamina.

"Karena itu tim penyidik perlu meneliti dengan seksama apakah dua kapal tanker VLCC tersebut merupakan aset negara atau bukan," paparnya.

Di samping itu, penjualan VLCC merupakan usulan direksi dan para komisaris hanya memberikan rekomendasi. Ibarat beli mobil, katanya, karena inden, maka STNK belum atas nama perseroan sehingga tudingan diduga merugikan negara Rp241 miliar tidak benar.

Laksamana juga menyebutkan dalam penjualan tanker tersebut tidak perlu persetujuan Menkeu karena dalam PP No. 41/2003 disebutkan bahwa Menkeu melimpahkan wewenang kepada Meneg BUM N ka-

Selain itu Kejagung juga pernah memeriksa sejumlah mantan pejabat Pertamina, di antaranya mantan Dirut Baihaki Hakim dan Widya Purnama.

Direktur Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung M. Salim mengatakan Kejagung dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka kasus penjualan VLCC.

"[Penetapan tersangka itu] setelah mendengarkan keterangan dari lima konsultan asing, yaitu Frontline, Hyundai Heavy Industries, Lehman Brothers, Goldman Sachs dan Equinox yang dijadwalkan pekan depan," katanya.

Selain itu, tuturnya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam waktu dekat juga akan melaporkan hasil audit kerugian negara dalam penjualan tanker raksasa tersebut. "BPK sedang menghitung kerugian negara."

Asabri

Dalam perkembangan lain, tersangka kasus PT Asabri, Mayjen TNI (Purn.) Subarda Midjaja mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan faktor umur dan kesehatan. Permohonan penangguhan disampaikan melalui kuasa hukumnya, Andi M. Asrun, kemarin.

Surat permohonan ditujukan ke Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan tembusan Wakil Jaksa Agung Mukhtar Arifin. JAM Pidsus Kemas

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

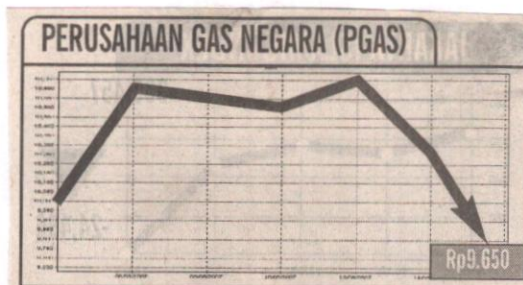
MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 SUMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



Fundamental:

Laba bersih Perusahaan Gas Negara pada kuartal pertama 2007 turun 25,82 persen, dari Rp 693,59 miliar menjadi Rp 514,50 miliar. Penurunan laba bersih ini disebabkan kerugian selisih kurs Rp 95,35 miliar. Penyebabnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah pada triwulan I 2007. Selain itu, beban pajak Perseroan juga meningkat menjadi Rp256,77 miliar. Pendapatan PGAS pada k-1 2007 meningkat 7,56 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1,717 triliun menjadi Rp1,846 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut juga diikuti dengan perolehan laba usaha triwulan I tahun 2007 sebesar Rp809,42 miliar, meningkat 10,70 persen dari periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp731,15 miliar.

Teknikal:

Saham berkode PGAS ini mencapai level terendah di Rp 7000 pada pertengahan Januari 2007. Level tertinggi berada di Rp 16.600 (16/8/06). Kemarin, saham ini ditutup turun Rp 600 menjadi Rp 9.650.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

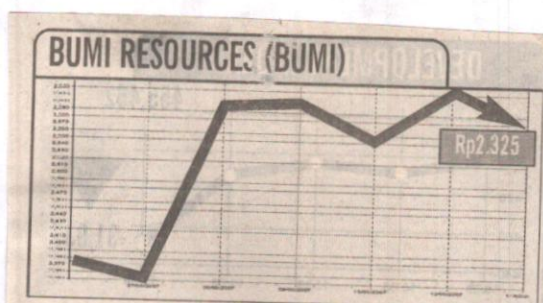
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



Fundamental:

Laba bersih PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melambung 698,3 persen menjadi 721,892 juta dolar AS (37,20 dolar per saham) per 30 Juni 2007 dari periode yang sama 2006 hanya sebesar 90,429 juta dolar (4,65 dolar per saham). Peningkatan laba bersih itu terutama berasal dari laba penjualan investasi yang mencapai 547,157 juta dolar. Penjualan bersih meningkat menjadi 1,152 miliar dolar dari sebelumnya 865,813 juta dolar. Pertumbuhan penjualan itu meningkatkan laba kotor dan laba usaha masing-masing 60,84 persen dan 36,23 persen menjadi 378,336 juta dolar dan 212,830 juta dolar. Sementara pos pendapatan lain-lain mencapai 518,083 juta dolar, terutama berasal dari laba atas penjualan investasi yang mencapai 547,157 juta dolar.

Teknikal:

Saham berkode BUMI ini tengah dalam tren naik sejak pertengahan September 2006 di level 710. Harga tertinggi dicapai pada pertengahan Maret 2006 di level Rp 980. Kemarin, saham ini ditutup turun Rp 250 menjadi Rp 2.325.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

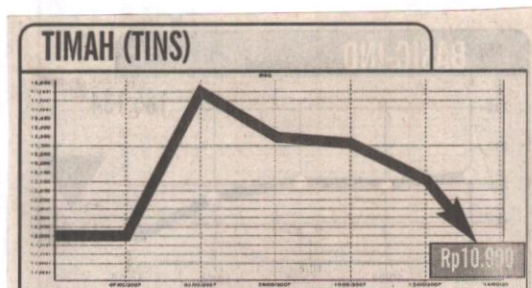
GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



Fundamental:

PT Timah membukukan laba bersih sebesar Rp314,3 milyar, atau 26 kali lebih tinggi dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun 2006 sebesar Rp11,6 milyar. Dengan demikian, laba bersih per saham juga 26 kali lebih tinggi dari Rp 23 per saham pada triwulan pertama 2006 menjadi Rp625 per saham pada triwulan pertama tahun ini. Peningkatan laba bersih ini disebabkan oleh meningkatnya volume produksi dan penjualan logam timah, yang dibarengi dengan tingginya harga logam timah di pasar internasional. Rata-rata harga logam timah yang diterima perseroan pada triwulan 1/2007 adalah 12.635 dolar AS per metrik ton, atau lebih tinggi 66 persen dibandingkan rata-rata harga logam timah yang diterima pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 7,629 dolar per metrik ton.

Teknikal:

Saham berkode TINS ini dalam tren menguat dari level terendah di Rp 2.175 (20/11). Kemarin, saham ini ditutup melemah Rp 1.700 menjadi Rp 10.900.

75

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2.1

TAHUN 2007

Kapal kargo curah mulai tinggalkan Indonesia

Oleh AIDIKAR M. SAIDI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Sejumlah kapal asing dan nasional yang sebelumnya mengangkut kargo curah (*bulk cargo*) di jalur domestik dikabarkan hengkang dari perairan Indonesia dan beralih mengangkut muatan luar negeri dengan tarif dua kali lebih tinggi.

"Kalau dulu diributkan tentang pengoperasian kapal asing melalui surat PPKA [Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing], sekarang justru kebalikannya. Angkutan batu bara nasional terancam mengalami kelangkaan kapal, artinya PLN bakal menghadapi krisis batu bara karena tidak dipasok tepat waktu," ungkap S. Soenarto, Direktur Utama PT Gurita Lintas Samudera, kepada *Bisnis*, kemarin

Menurut dia, kapal asing yang tahun lalu masih bersedia diikat dengan kontrak jangka panjang untuk angkutan batu

bara domestik dengan tarif sekitar US\$15.000 per hari, kini tarifnya sudah mencapai US\$40.000 per hari untuk jenis kapal Panamax berbobot mati 60.000 DWT hingga 70.000 DWT.

"Saat ini hanya ada satu kapal asing milik Korea yang mengangkut batu bara ke Paiton, sedangkan MV Java Power sudah hengkang beberapa waktu lalu."

Ongkos angkut

Secara teknis, kata Soenarto, tidak mungkin lagi mengharap kapal Panamax maupun Handymax bendera asing yang mau mengangkut muatan batu bara di dalam negeri, jika penyewa tidak menaikkan *freight* (ongkos angkut) sesuai pasar internasional.

Dia mengungkapkan harga jual dan sewa kapal di pasar internasional dalam enam bulan terakhir naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan ta-

hun lalu. Akibatnya, kapal yang selama ini beroperasi di jalur domestik ramai-ramai hengkang dari perairan Indonesia.

Kapal jenis Handymax kapasitas 45.000 DWT sampai 50.000 DWT untuk tahun pembuatan 1997 yang tahun lalu dijual seharga US\$16 juta kini naik menjadi US\$26 juta.

Soenarto mengatakan kapal asing kini tidak mau lagi kontraknya diperpanjang, kecuali disesuaikan dengan harga internasional. Padahal, tuturnya, sebelumnya berbagai pihak meributkan pemberian izin PPKA kapal asing itu karena dinilai melanggar asas *cabotage* atau komoditas domestik diangkut kapal nasional.

"Asas *cabotage* itu tertuang dalam Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan SK Menhub No. KM.71/2005 tentang komoditas antarpulau yang harus diangkut kapal bendera Indonesia."

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2007

Tumbuh, tetapi Masih Tetap Merana

Kita memang bukan bangsa yang pandai memanfaatkan semua keunggulan yang kita miliki. Hasil hutan yang merupakan sumber kekuatan bahan baku utama industri olahan pertanian di dalam negeri dijual dalam bentuk mentah. Semua hasil energi dan bahan galian tambang dari perut bumi dilepas begitu saja tanpa melihat kepentingan di dalam negeri.

Oleh — BANU ASTONO

Semuanya dijual begitu saja tanpa memikirkan risiko jangka panjang bagi industri nasional. Padahal, dengan semua keunggulan bahan baku itu, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain dunia di sektor industri manufaktur, khususnya yang berbasis agroindustri.

Buah yang dipetik dari kebijakan itu kini terasa sepet. Paling tidak setelah 10 tahun berlalu dari krisis, Indonesia seperti belum keluar dari kondisi itu. Pertumbuhan industri manufaktur tidak pernah di atas 6 persen.

Pertumbuhan sektor ini tetap jauh lebih rendah dari pertumbuhan sebelum masa krisis. Sektor riil, khususnya di sektor industri manufaktur nasional, jauh tertinggal dari industri pesaing di kawasan regional ASEAN.

Empat faktor

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri mengatakan, rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur saat ini jauh lebih rendah daripada sebelum krisis. Performa industri manufaktur sebelum krisis rata-rata mencapai pertumbuhan sekitar 11 persen, kini setelah 10 tahun krisis tinggal separuhnya.

Gambaran yang paling gamblang untuk melihat penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini adalah di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil, sepatu, dan

industri olahan kayu.

Pada era tahun 1986-1996 rata-rata tingkat pertumbuhan sektor industri di kelompok ini mencapai 20,3 persen. Namun, pada tahun 1997-2006 rata-rata tingkat pertumbuhannya tinggal menjadi 6,3 persen.

Kinerja ekspor pun kondisinya tidak lebih baik. Saat ini komoditas yang berkinerja baik di pasar ekspor umumnya adalah produk tambang, bahan baku, dan produk mentah pertanian seperti minyak kelapa sawit mentah atau CPO, karet, kopi, dan kakao. Membaliknya nilai ekspor itu dikarenakan adanya efek harga. Akan tetapi, dari sisi volume justru negatif.

Menurut Chatib Basri, ada empat hal yang membuat pertumbuhan sektor manufaktur ini tertekan. Pertama, karena masalah klasik, yakni ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini membuat profit industri nasional mengecil sehingga terjadi demotivasi dari para pelaku.

Aktivitas produksi pun menjadi tertekan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai produk impor yang masuk secara legal maupun ilegal dengan harga yang jauh lebih murah.

Kedua, rendahnya pertumbuhan industri manufaktur karena efek apresiasi mata uang. Inflasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir totalnya mencapai 50 persen, sementara di Thailand dalam kurun waktu yang sama hanya 15 persen. Apa artinya itu, barang produk manufaktur industri nasional tiga kali lebih mahal daripada produk sejenis yang diproduksi industri di Thailand.

Ketiga, adanya kekakuan dalam pasar tenaga kerja Indonesia sehingga daya saing sektor industri manufaktur menurun. Akibatnya, kegiatan ekonomi

bergeser dari sektor padat karya ke sektor *non-tradable* (sektor yang tak berkaitan dengan ekspor-impor), atau sektor bukan industri.

Misalnya sektor telekomunikasi, hotel, dan perdagangan. Bahasa terangnya, akhirnya orang malas masuk ke sektor industri manufaktur, atau lebih senang menjadi pedagang ketimbang industrialis.

Keempat, faktor energi. Faktor ini belakangan menjadi kendala dominan bagi para pelaku di industri manufaktur. Menurut Chatib Basri, bagaimana mungkin sektor industri dapat bertumbuh optimal jika kebijakan industri terkendala oleh faktor energi. Padahal, kinerja industri tekstil, sepatu, dan produk manufaktur lainnya menjadi optimal jika produksinya mampu dijalankan dengan skala ekonomi yang tinggi.

Hal itu hampir menjadi sebuah ke-mustahilan. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, jika ingin menjalankan mesin produksi selama 24 jam penuh, justru berisiko tinggi. Sektor industri ini bukan mendapatkan dukungan insentif dalam bentuk penurunan biaya energi, tetapi justru dikenai penalti.

"Industri TPT akan kena penalti dalam bentuk dayamax oleh PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) jika pemanfaatan listrik di atas ketentuan saat beban puncak. Belum lagi bicara soal tak menentunya pasokan gas dan sebagainya," kata Chatib Basri.

Padahal, sektor itu sampai saat ini masih menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan devisa negara. Paling tidak nilai ekspor komoditas ini tahun 2005 mencapai 8 miliar dollar AS lebih dan tahun 2006 mencapai 9 miliar dollar AS lebih.

Tidak lebih baik

Ekonom Faisal Basri pun sependapat dengan pandangan itu. Kondisi ma-

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

■ Duta Besar Korsel Lee Sun-jin RI Menjadi Mitra Ekonomi yang Meningkatkan Pesat

Jakarta - Kedekatan Korea Selatan (Korsel) dengan Republik Indonesia kian erat dalam kurun tahun-tahun terakhir. Ini tampak dari perdagangan bilateral kedua negara yang menunjukkan peningkatan pesat.

Korsel merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia, sementara Indonesia menjadi mitra dagang nomor sembilan terbesar bagi Korsel. Dengan volume perdagangan US\$ 13,6 miliar, surplus perdagangan berada di pihak Indonesia mencapai US\$ 3,8 miliar di 2006. Dengan rendah hati Duta Besar (Dubes) Korsel untuk Indonesia, Lee Sun-Jin, menyatakan tidak menargetkan volume perdagangan tahun 2007 bakal dua kali lipat dibanding 2001.

"Saya tidak suka dengan (angka) yang fantastis, yang praktis saja," ujar Dubes Lee ketika menerima SH di kediaman resminya di Jakarta, pekan lalu.

Namun, ia memperlihatkan dalam hal investasi, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi luar negeri terbesar, setelah China dan Amerika Serikat (AS). Sedangkan Korsel adalah investor keempat terbesar dengan 1.200 perusahaan beroperasi di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 500.000 pekerja Indonesia.

"Porsi besar tingkat impor datang dari Indonesia. Pada 2006, Korsel mengimpor 25 persen kebutuhan LNG (gas alam cair) dari Indonesia, batu bara dan tembaga juga sekitar 25 persen. Impor karet 22 persen, hasil hutan 12,4 persen dan minyak 4,6 persen di 2005," jelas Dubes Lee.

Namun, Korsel maju dalam teknologi dan pemanfaatan nuklir.



LEE SUN-JIN

1st

(PLTN) yang memasok 40 persen listrik bagi negara di selatan Semenanjung Korea itu.

"Korsel berpengalaman dengan PLTN sejak 1970-an," ujar Dubes Lee.

Tak heran kalau baru-baru ini Korsel-RI menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pem-

angunan PLTN. Namun, itu baru satu di antara sekian banyak MoU dalam bidang energi, pertambangan, kelistrikan, kehutanan, perkapalan dan pelabuhan, yang menandai kerja keras tim gabungan kedua negara sejak kunjungan Presiden Korsel ke Jakarta di 2006 hingga kunjungan Presiden RI ke Seoul, Juli lalu.

Jaga Momentum

Kendati demikian, Dubes Lee mengharapkan peningkatan lagi kerja sama di bidang ekonomi. Selain itu, di bidang lain, mengingat Korsel-RI memiliki banyak kemiripan dalam budaya, nilai, pengalaman peralihan dari sistem otoritarian ke demokrasi, dan pemberantasan korupsi.

"Kita perlu menjaga momentum ini tetap hidup, agar terus maju," tegas Dubes Lee.

Tak pelak kalau pekerjaan Dubes Korsel di Indonesia demikian padat. Namun, Dubes Lee menyatakan senang menjalani misinya di Indonesia yang telah berjalan dua tahun tiga bulan ini.

"Indonesia surga golf. Saya menyukai Bali. Tapi saya merasa cocok dengan Yogyakarta yang tenang, mirip dengan kota asal saya, Kwangju. Sama-sama kota tua dan pusat pendidikan," kata Lee Sun-Jin. Berulang kali diplomat senior ini menekankan persamaan dan kedekatan Korsel-RI

78